

Temanggung Mulai Vaksinasi Anak

TEMANGGUNG (KR) - Vaksinasi Covid-19 pada anak usia 6-11 tahun mulai diberikan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung, Agus Sujarwo mengatakan vaksinasi pada anak usia 6-11 tahun di Kabupaten Temanggung pertama kali diberikan di SD Negeri 1 Bansari dan MI Bansari.

"Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, vaksinasi di SD dan MI Bansari ini pertama kali untuk vaksinasi anak tingkat Jateng bertepatan dengan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Temanggung," kata Agus, Rabu (15/12).

Menurutnya, vaksinasi Covid-19 tersebut diberikan kepada 144 anak dari sekitar 250 siswa di SD dan MI Bansari. Terinci 79 siswa SDN 1 Bansari dan 65 siswa MI Bansari. Sementara yang lain baru seminggu lalu mengikuti bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) sehingga belum bisa melakukan vaksinasi.

Disebutkan, di Kabupaten Temanggung terdapat sekitar 56.000 anak usia SD, sedangkan anak yang sudah divaksin, khususnya anak kelas 6 yang usianya sudah 12 tahun lebih, sekitar 8.000 anak, sehingga anak SD/MI yang belum divaksin sekitar 48.000 anak. "Setelah kegiatan hari ini, kami langsung koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan vaksinasi anak selanjutnya, karena Temanggung sudah menerima vaksin dari provinsi sebanyak 50.000 dosis," ungkap Agus Sujarwo. (Osy)

Pati Fokus 6 Kebijakan

PATI (KR) - Alokasi dana APBN tahun 2022 untuk Kabupaten Pati mencapai Rp 1,499 triliun. Jumlah Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) tersebut, turun 0,46 persen dibandingkan dengan alokasi tahun 2021. Jumlah anggaran merupakan dana yang dikelola satuan kerja pemerintah pusat, belanja tugas dana pembantuan yang dikelola OPD dan dana DAK fisik, dan dana desa. "Penggunaan APBN tahun 2022 difokuskan terhadap enam kebijakan utama," kata Bupati Pati Haryanto SH MM MSi, Selasa (14/12).

Enam kebijakan utama tersebut adalah, melanjutkan pengendalian Covid-19, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, peningkatan SDM yang berintegritas, melanjutkan pembangunan infrastruktur, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesehatan antar daerah, dan melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan Zero Based Budgeting untuk mendorong belanja lebih efisien.

Terhadap pimpinan KPA, OPD, Camat dan kepala desa, Bupati Haryanto menegaskan, bahwa dana APBN dan APBD merupakan amanah yang dipercayakan pemerintah pusat untuk dikelola dengan sebaik-baiknya di daerah. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat di Pati. (Cuk)

UNTUK MEMBANTU PENANGANAN KEJAHATAN

UMP Luncurkan Mobil Siber Forensik

PURWOKERTO (KR) - Laboratorium Digital Forensik Siber Universitas Mu-

hammadiyah Purwokerto (UMP), Selasa (14/11) di Kampus UMP, meluncurkan

mobil Siber Forensik yang digunakan untuk menangani kejahatan siber. Mobil ini

dapat dipakai untuk membantu penegak hukum dan kepolisian.

Forensik bertujuan untuk menangani kejahatan siber yang diperuntukkan membantu penegak hukum dan kepolisian. "Mobil Siber Forensik ini portable dan bisa bergerak ke mana-mana, sehingga kalau ada kejadian bisa dilakukan di tempat kejadian perkara," jelas Prasetyo Aji.

Peluncuran mobil Siber Forensik yang merupakan satu-satunya di Indonesia dilakukan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr KH Haedar Nashir didampingi Rektor UMP Dr Jebul Suroso. Peluncuran mobil Siber Forensik dilakukan bersamaan dengan peresmian Log Mart Asrama, Klinik UMP, dan Pusat Studi Kebijakan dan Inovasi Kesehatan. "Saya sangat mengapresiasi peresmian mobil Siber forensik," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Ketua Digital Forensik Siber UMP, Prasetyo Aji menjelaskan peluncuran mobil Siber

Mobil Siber Forensik milik UMP merupakan hasil riset yang dilakukan petugas Laboratorium Digital Forensik UMP. Mobil itu dilengkapi peralatan lengkap yang bisa melakukan pelacakan kejahatan siber. Juga dilengkapi drone, listrik mandiri dan satelit. Dengan demikian, saat ada kejadian kejahatan siber, mobil ini bisa bergerak langsung ke lokasi kejadian dan melakukan pelacakan. (Dri)



Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir meresmikan penggunaan mobil Siber Forensik di Kampus UMP.

DI KABUPATEN BREBES

Ratusan Calon Kasek Desak Pelantikan

BREBES (KR) - Ratusan calon kepala sekolah (kasek) di Kabupaten Brebes sudah dinyatakan lolos tes sekitar lima bulan yang lalu namun hingga kini belum ada kejelasan pelaksanaan diklat dan pelantikan. Karena itu, mereka mengadu ke DPRD setempat, Senin (13/12), minta agar anggota dewan memperjuangkan aspirasi mereka.

Menurut sejumlah calon kepala sekolah, sesuai aturan, setelah mereka dinyatakan lolos tes akan ada tindak lanjutnya, yakni, mengikuti diklat dan pelantikan sebagai kasek.

"Bagaimana kami tidak resah? Sudah lima bulan lolos tes namun sampai kini tindak lanjutnya tidak ada. Padahal sebentar lagi sudah berganti tahun," ujar beberapa calon kasek, Selasa (14/12).

Menurut Hansen, salah seorang

perwakilan calon kepala sekolah, sejak dinyatakan lolos Agustus lalu sampai sekarang belum ada kejelasan. Padahal sesuai aturan, para calon kasek akan mengikuti diklat dan dilanjutkan pelantikan. Tahun 2021 ini merupakan tahun terakhir bagi guru yang akan menjadi kepala sekolah melalui program diklat.

"Sesuai informasi dari Dinas Pendidikan, tahun 2022 mendatang akan mulai dilaksanakan jabatan kepala sekolah melalui program guru penggerak. Kalau menggunakan program guru penggerak, jelas kami tidak boleh mengikutinya, karena faktor usia," tandas Hansen.

Menurutnya, total calon kepala sekolah yang dinyatakan lolos seleksi di Brebes pada tahun 2021 sebanyak 219 orang. Mereka me-

rupakan calon kepala sekolah tingkat TK, SD dan SMP. Dalam audiensi dengan Komisi IV DPRD Brebes, bahwa pada 2021 Dinas Pendidikan sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran diklat calon kepala sekolah sebesar Rp 600 juta.

Karena pandemi, anggaran tersebut difokuskan, sehingga Dinas Pendidikan tidak bisa melaksanakannya, dan dialokasikan kembali pada 2022. Sejumlah calon kepala sekolah yang telah lolos seleksi mengaku tidak yakin bisa dilaksanakan, karena akan muncul aturan guru penggerak.

Ketua Komisi IV DPRD Brebes, Muhaimin Sadirun mengatakan, para calon kepala sekolah itu resah, menyusul adanya surat Kementerian Pendidikan berkaitan pelantikan kepala sekolah. Pelantikan kepala sekolah dari pro-

gram diklat itu hanya bisa dilaksanakan hingga tahun 2021.

Sedangkan tahun 2022, pengisian kepala sekolah harus dari program guru penggerak. "Kendati surat terkait kebijakan itu sudah muncul hingga daerah, tetapi undang-undang sebagai paung hukumnya saat ini belum disahkan, karena masih proses revisi," ungkap Muhaimin.

Karena itu, pihaknya berharap revisinya ditunda. Kalau terpaksa harus dilaksanakan, pemberlakuannya tidak pada tahun 2022. Sebab, penerapan aturan baru itu juga butuh sosialisasi dan lainnya.

"Bersama dengan PGRI dan Dinas Pendidikan, nanti kami akan ke Kementerian Pendidikan untuk minta kebijakan agar ketentuan ini tidak diberlakukan di tahun 2022," tegas Muhaimin. (Ryd)

HUKUM

GEGERA SELINGKUH

Dua Anggota Polres Pati Terkena PTDH

SEMARANG (KR) - Dua anggota Polres Pati, yakni Bripta ARP dan Aiptu MDK, mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Hal ini menyusul hasil sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Keduanya terbukti terlibat berselingkuh di sebuah hotel Semarang saat digerebek petugas gabungan.

"Polri bertindak tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan anggota. Keduanya dijatuhi sanksi PTDH," jelas Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Iqbal Alqudusy di Semarang, Selasa (14/12). "Keduanya, saat ini sedang mengajukan banding. Namun, Polri telah membebaskan Bripta ARP dan Aiptu MDK," jelasnya.

Kombes Iqbal Alqudusy, menyebutkan lantaran Bripta ARP dan Aiptu M mengajukan banding, keduanya ditarik ke Polda Jateng. "Ini dilakukan sambil menunggu arahan lanjutan dari Mabes Polri. Langkah banding merupakan upaya terakhir anggota Polri untuk mempertahankan karirnya," ungkapnya.

Sebelumnya, beredar video berdurasi

2 menit 39 detik. Dalam video tersebut merekam penggerebekan seorang polwan yang sedang berduaan dengan seniornya di sebuah hotel di Semarang.

Sebagaimana diberitakan, jagat Pati dihebohkan munculnya sebuah video yang menayangkan oknum polisi wanita digerebek suaminya. Polwan ARP, berpangkat Bripta sedang berduaan di sebuah hotel Semarang dengan Aiptu MM.

Menariknya, penggerebekan justru dilakukan Brigadir (suami Bripta ARP) bersama sejumlah petugas Propam Polda Jateng, 24 Maret 2021 lalu.

Nasib kedua oknum polisi pasangan selingkuh tidak lepas dari kecurigaan Brigadir Muhammad Doni Kalbuadi, suami sang oknum Polwan Bripta ARP.

Sang suami membuntuti istrinya yang mabuk cinta dengan lelaki seprofesi dibantu anggota lain melakukan penggerebekan di kamar salah satu hotel di Semarang. Aksi penggerebekan berlanjut sampai ke kesatuan itu sempat divideo dan viral di media sosial.

(Cuk/Cry)-f



Suasana penggerebekan perselingkuhan yang melibatkan oknum anggota Polres Pati.

DIDUGA KORUPSI DANA DESA

Oknum Kades Ditahan Kejari Brebes

BREBES (KR) - Diduga korupsi Dana Desa tahun 2019, seorang oknum kepala desa (kades) di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pihak Kejaksaan Negeri Brebes.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Brebes Mernawati didampingi Kasi Pidsus Naseh, mengatakan, oknum kades berinisial DF (54) itu kini dititipkan di Lapas Kelas IIB Brebes.

Diungkapkan, kasus itu sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang dan tengah menunggu tahap persidangan.

"Setelah dilakukan penyelidikan perkara dinyatakan lengkap, tersangka sudah kami tahan dan dititipkan di Lapas Brebes, sampai sekarang, tinggal menunggu sidang," tegas Naseh.

Secara rinci disebutkan, DF di-

duga telah melakukan pelanggaran saat mengelola keuangan dana desa tahun 2019 lalu. Sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 101.820.000, yang terbagi dalam beberapa rincian.

Di antaranya, anggaran kegiatan Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat (SIPBM) Rp 62.174.000, anggaran kegiatan Pelatihan MS Office bagi Perangkat Desa Rp 22.646.000, dan sisa anggaran pembelian mobil siaga sebesar Rp 17.000.000 yang seharusnya dipakai untuk biaya modifikasi mobil siaga.

"Dalam kasus itu, penyidik Kejari Brebes telah melakukan pe-

meriksaan terhadap 15 orang saksi dan satu saksi ahli," tutur Naseh.

Menurut Naseh, tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Kami dari pihak Kejaksaan Negeri Brebes menahan tersangka dengan beberapa alasan. Di antaranya dikhawatirkan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidananya," tegas Naseh. (Ryd)-f

DIDUGA KORSLETING LISTRIK

Masjid Agung Brebes Terbakar

BREBES (KR) - Sejumlah warga yang tengah beribadah di Masjid Agung Kabupaten Brebes mendadak cemas, menyusul terjadi kebakaran di ruang sound system hingga kobaran api merambat ke atap masjid. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang diduga akibat arus pendek listrik itu, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

Menurut keterangan pengurus Masjid Agung, Brebes, Sumarto, api diduga berasal dari korsleting listrik yang ada di ruangan sound system di Masjid Agung itu.

"Untuk kegiatan jemaah, Insya Allah tidak terganggu, nantinya akan dipindahkan ke ruangan yang tidak bau asap," ujar Sumarto, Rabu (15/12).

Kerusakan selain atap juga sejumlah alat elektronik, untuk sementara kegiatan adzan tidak menggunakan pengeras suara.

"Sambil menunggu perbaikan, untuk adzan sementara tidak

menggunakan pengeras suara. Untuk ruangan yang bau asap sementara dikosongkan, jemaah dipindahkan ke lokasi lain," tegas Sumarto.

Menurut Kepala Satpol PP Kabupaten Brebes, Supriyadi, kebakaran terjadi Selasa (14/12) sekitar pukul 10.00, tapi muncul di ruangan sound system, diduga adanya korsleting listrik. Sebelum terjadinya kebakaran terdengar suara gemericik api di ruang sound system oleh jemaah yang sedang Salat Dhuha.

"Saat dicek, ruang tersebut langsung keluar asap dan terlihat ada api. Pemadaman sempat diupayakan oleh saksi dan pengurus masjid. Namun tidak mampu, maka mereka langsung menelepon petugas kebakaran untuk membantu memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 2 mobil pemadam kebakaran diterjunkan," jelasnya.

Kasi Damkar Satpol PP Kabupa-

ten Brebes, Kisyanto, membenarkan terkait peristiwa itu. Menurutnya, laporan ke petugas Damkar lebih dapat sehingga memudahkan pemadaman tapi sehingga belum sempat menjalar ke ruangan lainnya.

"Tadi yang terbakar itu ruangan sound system dan sebagian atap di tempat salat dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini," ujar Kisyanto.

Sementara Bupati Brebes, Idza Priyanti, berharap ke depan pengurus masjid lebih cermat terhadap ruangan peralatan elektronik yang membutuhkan listrik, karena kalau tidak dikuatirkan dapat terjadi kebakaran lagi.

"Khususnya di ruangan yang ada peralatan elektronik yang berhubungan dengan listrik harus sering dikontrol, kalau ada yang rusak segera diperbaiki, agar tidak terjadi korsleting listrik yang bisa menimbulkan kebakaran," ujar Idza. (Ryd)-f